



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI KINERJA KPK MELALUI DASHBOARD MONITORING "AKU KPK"

Disusun Oleh

Nama : **INDIRA MALIK, SE, MT**
NIP/NPP : **000060**
NDH : **A/13**
NIP/NPP : **000060**
Instansi : **Komisi Pemberantasan Korupsi**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BEKERJASAMA DENGAN**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN VII
TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII
TAHUN 2020**

**PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI KINERJA KPK
MELALUI DASHBOARD MONITORING "AKU KPK"**

**Nama : INDIRA MALIK, SE, MT
NIP : 000060
NDH : A/13
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi**

Telah diseminarkan pada :

**Hari : Jumat
Tanggal : 4 Desember 2020
Tempat : PPMKP Ciawi Bogor**

Mengesahkan telah diseminarkan,

MENTOR

COACH

**Ir. MOHAMMAD HADIYANA, M. Eng
DEPUTI INFORMASI DAN DATA**

**Drs. PANANI, MA.
WIDYAISWARA AHLI UTAMA**

PENGUJI

**Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS
STAFF AHLI MENTERI**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XVII TAHUN 2020

Nama : INDIRA MALIK, SE, MT
NIP : 000060
NDH : A13
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi
Telah diseminarkan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 4 Desember 2020
Tempat : PPMKP Ciawi Bogor

Mengesahkan telah diseminarkan,

MENTOR

COACH

Ir. MOHAMMAD HADIYANA, M. Eng
DEPUTI INFORMASI DAN DATA

Drs. PANANI, MA.
WIDYAIKWARA AHLI UTAMA

PESERTA

INDIRA MALIK, SE, MT
SPESIALIS PENGOLAHAN INFORMASI DAN DATA UTAMA

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta Pelatihan Kepemimpinan

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : INDIRA MALIK, SE , MT

Jabatan : Spesialis Pengolahan Informasi dan Data Utama

Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi

adalah peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020 di PPMKP Kementerian Pertanian;

2. Pejabat Pembina Kepegawaian

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IR. MOCHAMMAD HADIYANA, MENG

Jabatan : Deputi Informasi dan Data

Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di seluruh Unit kerja di KPK milestone jangka menengah yaitu Desember s.d. Agustus 2021 dan Jangka Panjang yaitu September sampai dengan Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan segala konsekuensinya

Jakarta, 7 Desember 2020

Peserta pelatihan

Mengetahui,

Pejabat Pembina Kepegawaian

INDIRA MALIK, SE, MT

NPP. 0000060

IR. MOCHAMMAD HADIYANA. M. ENG

NIP. 196607291994021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mengoptimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mewujudkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan maka perlu menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Sistem akuntabilitas kinerja tersebut diatur mengenai kontrak kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan capaian kinerja. Nilai capaian kinerja itu dilaporkan secara manual setiap tiga bulan sekali.

Proyek perubahan ini dimaksudkan untuk mengotomasi proses pemantauan kinerja dengan membangun modul manajemen kinerja sebagai bagian dari Sistem Terintegrasi Internal Komisi (STINKO) sebuah aplikasi internal yang digunakan KPK untuk membantu pelaksanaan kegiatannya terutama kegiatan yang berhubungan dengan Kesekjenan. Proses otomasi termasuk membangun koneksi antara modul manajemen kinerja dengan aplikasi operasional lainnya sehingga data dapat disajikan lebih cepat dan lebih akurat karena diambil dari sumbernya langsung. Lebih jauh, modul kinerja dilengkapi dengan Dashboard Kinerja yang memudahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas memantau kinerja unit kerja/ proses penyelesaian suatu kegiatan/layanan (*continuous monitoring*). Dashboard -yang diberi nama dashboard “**AKU KPK**”- ini juga dilengkapi dengan indikator merah-kuning-hijau untuk memberi peringatan dini (*early warning*) ketika ada target yang tidak tercapai. Dashboard dapat diakses dari mana saja dan kapan saja oleh Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK. Sekarang wabah Pandemi bukan lagi menjadi halangan bagi semua *stakeholder* untuk bisa mendapat informasi lebih cepat. Unit kerja pun dapat melakukan aksi lebih cepat bila terjadi penyimpangan capaian layanan. Dalam jangka yang lebih panjang unit kerja dapat lebih optimal dalam pencapaian target kinerja.

Agar apa yang dilakukan berkesinambungan (*sustain*), penulis bersama dengan tim efektif juga mencoba merumuskan perubahan atas Peraturan Pimpinan KPK no 6 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK. Perubahan ini terutama untuk mengakomodasi proses otomasi yang dilakukan, sehingga ke depan, perhitungan Indeks Kinerja Utama (IKU) berbasis aplikasi menjadi semakin banyak dan tingkat validitas dan kualitas IKU yang digunakan pada kontrak kinerja di KPK akan semakin baik.

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 8 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 10 |
| LATAR BELAKANG | 10 |
| TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF | 12 |
| BAB 2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 15 |
| RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN..... | 16 |
| TAHAPAN PERUBAHAN..... | 16 |
| PETA STRATEGIS MARKETING | 18 |
| BAB 3 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN | 19 |
| PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN | 19 |
| PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF..... | 19 |
| PEMBANGUNAN DASHBOARD APLIKASI KINERJA | 20 |
| PEMBAHASAN IKU DIREKTORAT PINDA DAN BIRO UMUM | 21 |
| PEMBAHASAN PERATURAN PIMPINAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KPK. | 23 |
| PERMASALAHAN DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASINYA..... | 25 |
| STRATEGI PROSES MARKETING | 27 |
| PERUBAHAN DUKUNGAN STAKEHOLDER | 28 |
| BAB 4 PENUTUP | 33 |
| KESIMPULAN | 33 |
| REKOMENDASI | 33 |
| LESSON LEARNT..... | 33 |
| DAFTAR GAMBAR | 35 |
| DAFTAR BUKTI KEGIATAN : | 36 |
| SK TIM EFEKTIF PEMBANGUNAN DASHBOARD KINERJA KPK | 36 |
| TAMPILAN LAYAR MODUL APLIKASI KINERJA DAN DASHBOARD KINERJA | 38 |
| UNDANGAN ZOOM MEETING | 41 |
| DOKUMENTASI ZOOM MEETING..... | 42 |
| PEMBAHASAN DENGAN BIRO UMUM | 44 |
| PEMBAHASAN DENGAN DIREKTUR PINDA..... | 45 |
| PAPARAN KE PIMPINAN KPK | 46 |

| | |
|---|----|
| PAPARAN KE DEWAN PENGAWAS..... | 47 |
| NOTA DINAS BAHAN PENYEMPURNAAN PERPIM SAK KPK | 48 |

PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI KINERJA KPK

MELALUI DASHBOARD MONITORING

”AKU KPK”

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Sesuai dengan Perkom 03 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pengolahan Informasi dan Data selanjutnya disebut Direktorat Pinda adalah salah satu Direktorat di bawah Deputi Informasi dan Data yang mempunyai fungsi : **pengumpulan dan pengolahan data dan informasi**, termasuk analisis informasi untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, **kepentingan manajerial** maupun untuk deteksi kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi.

Salah satu informasi penting yang diharapkan dapat disediakan Direktorat Pinda adalah informasi pencapaian kinerja, baik informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja lainnya dan parameter-parameter pendukung kinerja lainnya, seperti informasi pemenuhan kontrak layanan (*Service Level Agreement - SLA*). *Service level Agreement* adalah kontrak penyelesaian layanan yang diperjanjikan suatu unit dalam memberikan layanan kepada unit lain atau ke publik. Suatu unit kerja dapat menjadikan SLA layanannya sebagai indikator kinerja, namun tidak selalu dijadikan sebagai indikator kinerja utama yang dicantumkan di kontrak kinerja.

Dashboard Kinerja KPK merupakan perangkat lunak yang menyajikan informasi dalam berbagai bentuk grafis yang memudahkan pembacanya untuk membandingkan data terkait kinerja secara simultan. Dashboard yang dibangun menggunakan media berbasis web yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan hak akses yang ditentukan. Dashboard terdiri dari dashboard organisasi KPK sebagai lembaga dan dashboard unit-unit kerja di lingkungan KPK. Dashboard dapat diakses oleh Pimpinan, Dewan Pengawas, struktural dan pegawai KPK berdasarkan prinsip *need to know basis*. Dashboard Kinerja Organisasi KPK dapat diakses oleh publik melalui web site KPK dan dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan masyarakat tentang kinerja KPK.

Sebagai organisasi yang adaptif KPK harus bisa bekerja sistemik, holistik dan memonitor kegiatan untuk pencapaian tujuan. Untuk itu KPK harus memiliki sistem monitor yang komprehensif. Dashboard kinerja adalah bagian dari sistem monitoring ini. Dashboard Kinerja KPK ini nanti dapat digunakan untuk memonitor semua kegiatan yang ada di KPK.

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejak disahkannya UU No 19 tentang 2019 KPK terjadi beberapa perubahan di KPK. Tugas KPK yang semula ada lima tugas kini menjadi enam tugas masing-masing : a) Pencegahan b) Monitor c) Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan d) Koordinasi e) Supervisi dan f) Eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu di publik tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK menurun¹. Walaupun KPK menganggap turunnya penilaian ini sebagai pemberi semangat, di internal tetap harus diperlukan perubahan untuk bisa menjawab dengan lugas penilaian masyarakat ini. Sejumlah terobosan perlu dilakukan untuk membuat internal KPK lebih baik dan meraih kembali hati publik dengan kinerja yang terukur dan transparan.

Peraturan Pimpinan KPK No 6 tahun 2019 *tentang* Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan kinerja yang telah disusun wajib dipantau dan dievaluasi, baik evaluasi interim maupun evaluasi tahunan.

Pemantauan dan Evaluasi Interim merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui kemajuan pencapaian kinerja, mengidentifikasi masalah atau kendala, serta menyusun rencana aksi perbaikan kinerja yang dilakukan setiap triwulan. Pemantauan dan Evaluasi Interim dilaksanakan oleh atasan langsung dari pimpinan setiap tingkatan organisasi melalui Rapat Tinjauan Kinerja dengan menggunakan bahan pembahasan berupa rancangan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, KPK membangun peta strategi dengan metodologi *Balanced Scorecard* melalui penetapan serangkaian tujuan strategis yang saling terkait. Untuk setiap sasaran strategis ini kemudian ditetapkan IKU - Indikator Kinerja Utama. Untuk memonitor pencapaian IKU dilakukan Rapat Tinjauan Kinerja berjenjang.

¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/22/perlu-terobosan-baru-untuk-pulihkan-kepercayaan-pada-kpk/>

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi yaitu: KPK- Wide; KPK-One (di tingkat eselon 1); KPK-Two (di tingkat eselon 2) ; dan KPK- Three (di tingkat eselon 3 atau yang setara).

Walaupun KPK telah memiliki Sistem akuntabilitas kinerja, ada beberapa kondisi saat ini yang menjadi pertimbangan munculnya ide proyek perubahan ini.

- Pertama, kegiatan di KPK sudah banyak yang dilakukan dengan bantuan aplikasi. Sebagian dari informasi kinerja itu dapat dihitung dari data yang ada di masing-masing aplikasi. Tapi aplikasi yang menghasilkan informasi itu masih bersifat *scatter* dan terpisah-pisah, **antar aplikasi itu belum terkoneksi**. akibatnya manajerial kesulitan jika diperlukan menyandingkan data yang berasal dari lebih dari satu aplikasi. Misal : informasi pemenuhan permintaan layanan rumah tangga berada di aplikasi yang terpisah dengan aplikasi HRIS (human resources information system) . Akibatnya tidak mudah bagi Kepala Biro Umum ketika ingin menganalisa apakah terlambatnya pemenuhan layanan di Biro Umum karena kurang pegawai di masing-masing bagian atau karena hal yang lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk membangun sinergitas antar aplikasi di KPK.
- Kedua, Pimpinan, Dewan Pengawas dan Struktural **sulit mengakses informasi kinerja di KPK**. Saat ini masing-masing unit masih melakukan rekap manual untuk menghitung capaian kinerja unitnya. Untuk itu ditunjuk seorang PIC kinerja yang akan mengumpulkan data, menghitung dan melaporkan capaian kinerja. Pencapaian kinerja baru dapat diketahui paling cepat seminggu setelah triwulan berakhir, yaitu ketika PIC kinerja selesai melakukan penghitungan dan melaporkannya dalam Laporan Capaian Kinerja triwulanan. Namun tiga bulanan ini dianggap terlalu lambat. Permintaan informasi di luar jadwal penghitungan akan menjadi pekerjaan tambahan bagi PIC Kinerja. Dibutuhkan waktu tambahan dan menyita waktu untuk kegiatan lainnya. Peminta informasi juga menjadi kesal karena pada waktu dibutuhkan informasi tidak langsung tersedia, sehingga beberapa keputusan dibuat tanpa menggunakan data yang diharapkan
- Ketiga, masalah di atas disebabkan karena saat ini **belum ada nya dashboard** yang dapat menyediakan informasi kinerja secara real time atau semi real time di KPK dan tentu saja **pedoman dalam penyediaan akses informasi (kinerja)** di KPK. Dengan adanya pandemi covid, maka interaksi fisik berkurang, komunikasi menjadi kurang lancar. Sehingga ketika ada pertanyaan mengenai progres kinerja, proses

- mendapatkan informasi menjadi lebih lama lagi. Manajemen butuh sistem yang dapat memberi tahu mereka seketika bila ada proses yang tidak berjalan semestinya.
- Keempat, belum ada keterbukaan informasi kinerja bagi pegawai di unit kerja. Informasi kinerja hanya diketahui oleh kepala unit kerja dan PIC kinerja. Proses penghitungan **belum transparan** dan **akuntabel**. Akibatnya keterlibatan (*engagement*) pegawai dalam pencapaian kinerja unit masih belum optimal. Pegawai sekedar menjalankan perintah dari atasannya.
 - Kelima, dalam tataran kebijakan juga belum adanya **pengaturan tentang tata kelola informasi** kinerja di KPK. Kebijakan yang mengatur siapa (bukan terbatas hanya PIC kinerja) akan melakukan apa dan kapan dalam rangka penyediaan informasi kinerja

TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF

Proses menciptakan peta strategi memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu organisasi bisa dicapai melalui serangkaian tujuan strategis yang saling terkait. Salah satu sebab dari kegagalan strategi lembaga adalah karena lembaga tidak bisa memonitor dengan baik progres implementasi strateginya². Strategi baru tidak dapat terimplementasi dengan baik bila pemantauan pencapaiannya lemah.

Karena tidak mudahnya untuk memantau progres, maka KPK saat ini hanya bisa memantau progresnya triwulanan. Pemantauan progres bulanan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Akibatnya tingkat adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan masih belum optimal.

Sebagai organisasi adaptif, KPK harusnya bisa berpikir sistemik, holistik dan terkoneksi. Dan itu hanya dapat dilakukan bila para *stakeholder* di internal mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya Sistem Monitoring Online ini diharapkan bagi internal ini akan :

- Memudahkan pimpinan dan struktural dalam memantau kinerja unit kerja/ proses penyelesaian suatu kegiatan/layanan (*continuous monitoring*). Monitoring kinerja dapat dilakukan setiap saat.

² Certified Strategy Execution Profesional Course Material, 2015

- Adanya peringatan dini (*early warning*) ketika ada target yang tidak tercapai. Unit kerja dapat segera mengambil langkah antisipasi (tanpa menunggu periode triwulan) bila ada pelayanan yang mengalami hambatan dan mengambil tindakan yang diperlukan. (*speedup decision making*) dan ini membantu KPK menjadi organisasi yang lebih lincah (*agile*).
- Unit kerja dapat lebih optimal dalam pencapaian target kinerja. Peningkatan kinerja unit kerja dan KPK secara keseluruhan.
- Pencapaian KPI lebih transparan dan akuntabel, dan tidak dimungkinkan untuk dimanipulasi. Sedang bagi masyarakat/ publik, informasi kinerja KPK yang ditayangkan di website KPK akan menjadi jawaban tentang KPK yang berkinerja.

Tujuan proyek perubahan ini terbagi dalam :

- Tujuan Jangka Pendek (September - November 2020)
 - Tersedianya layanan dashboard monitoring kinerja berbasis web untuk Direktorat Pinda dan Biro Umum
 - Tersedianya pedoman akses informasi kinerja
 - Tersedianya informasi kinerja pada layar monitor di ruang kerja pegawai
 - Tersedianya draft kebijakan (Perpim) tata kelola informasi kinerja di lingkungan KPK
- Tujuan Jangka Menengah (Desember 2020 - Agustus 2021)
 - Dashboard kinerja online sudah dapat digunakan untuk semua unit di KPK.
 - Dashboard dapat diakses dari mobile phone/ tablet.
 - Terimplementasinya Perpim tata kelola informasi kinerja KPK
- Tujuan Jangka Panjang (Agustus 2021 - Desember 2022)
 - Dashboard kinerja sudah terhubung dengan kinerja Individu
 - Perpim Tata Kelola Informasi Kinerja di evaluasi dan sempurnakan secara berkala

Output dan outcome

OUTPUT

- Tersedianya Dashboard Kinerja unit kerja di lingkungan KPK yang bisa diakses kapan saja dimana saja dengan akses yang ditentukan.
- Layar monitor ruang kerja pegawai yang menayangkan dashboard kinerja unit
- Panduan akses informasi kinerja
- Kebijakan (Peraturan Pimpinan) yang mengatur tata kelola informasi kinerja di KPK

OUTCOME

- Optimalnya peran Direktorat Pengolahan Informasi dan Data dalam menyediakan informasi untuk peningkatan kinerja unit kerja di KPK
- Meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian visi dan misi KPK
- Masyarakat bisa ikut memantau langsung kinerja KPK.
- Satu Data di KPK. Tidak ada lagi perbedaan data antar Pimpinan maupun dengan struktural ketika bicara angka kinerja di KPK.

BAB 2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Mencermati kondisi sebagaimana di paparkan di atas, maka kami mengusulkan proyek perubahan berupa : **Peningkatan Layanan Informasi di KPK melalui penyediaan Dashboard Kinerja KPK**. Untuk itu berikut beberapa langkah yang harus dilakukan:

1. **Membuat API (*Application Programming Interface*) sebagai sarana penghubung antar aplikasi**. API akan memudahkan proses penarikan data dari satu aplikasi dan mengumpulkannya dalam suatu *Data mart* untuk selanjutnya dibuatkan dashboard untuk berbagai keperluan
2. **Menyediakan layanan informasi kinerja berbasis web**. Setelah informasi terkumpul dalam *Data mart*, informasi diolah dan disajikan dalam bentuk dashboard yang berbasis web dan dapat diakses melalui browser pengguna.
3. **Menyusun pedoman akses informasi (kinerja)**. Agar dashboard dapat digunakan dengan optimal perlu juga disiapkan pedoman akses dan penggunaan dashboard.
4. Menyediakan **layanan informasi kinerja di layar monitoring unit kerja dan aplikasi internal**. Agar informasi kinerja mudah terlihat dan bisa mendapat respons segera, perlu disediakan layar monitoring yang dapat dilihat pegawai dalam unit kerja. Layar ini akan menyajikan informasi kinerja (dalam bentuk dashboard) sehingga dengan melihat pergerakannya setiap hari diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan (*engagement*) pegawai.
5. Menyusun draft **Perpim untuk mengakomodasi tata kelola informasi kinerja** di lingkungan KPK. Agar upaya ini berkelanjutan maka perlu disusun peraturan pimpinan yang mengatur tata kelola informasi khususnya informasi kinerja.

Mengingat terbatasnya waktu untuk menyelesaikan Proyek Perubahan, maka dashboard kinerja yang akan disiapkan dalam jangka pendek (sampai dengan awal Desember 2020) adalah Dashboard kinerja Direktorat Pinda dan Dashboard kinerja Biro Umum.

RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN.

Secara garis besar ruang lingkup perubahan proyek ini terdiri dari dua hal :

1. Pembangunan modul kinerja beserta dashboard kinerja monitoring IKU
2. Otomasi pengisian dashboard dengan membuat link antar aplikasi dashboard dan aplikasi yang telah dibangun di lingkungan KPK. Dengan cara ini diharapkan proses perhitungan nilai capaian lebih cepat, dan mengurangi risiko nilai capaian “dicurangi”
3. Penyusunan Draft Perubahan Peraturan Pimpinan KPK tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

TAHAPAN PERUBAHAN

Proyek perubahan ini disusun dalam tiga tahap , masing-masing Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

TAHAPAN PERUBAHAN JANGKA PENDEK (SEP-NOV 2020)

M= Minggu

| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | Terbentuknya tim efektif penyusunan dashboard kinerja KPK | | | | | | | | | | |
| 2 | Membuat API (<i>Application Programming Interface</i>) sebagai koneksi antar aplikasi | | | | | | | | | | |
| 3 | Membangun layanan dashboard informasi kinerja berbasis web untuk Dit. Pinda dan Biro Umum | | | | | | | | | | |
| 4 | Menyusun pedoman akses dashboard kinerja | | | | | | | | | | |
| 5 | Menyediakan layanan informasi kinerja di layar monitoring unit kerja. | | | | | | | | | | |

BAB 3 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN

Beberapa tahapan kegiatan yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan kegiatan proyek perubahan

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

Tim Efektif terdiri dari Tim dari Direktorat Pengolahan Informasi, Biro Umum dan Biro Perencanaan dan keuangan (Bagian Perencanaan dan Organisasi.)

Lampiran

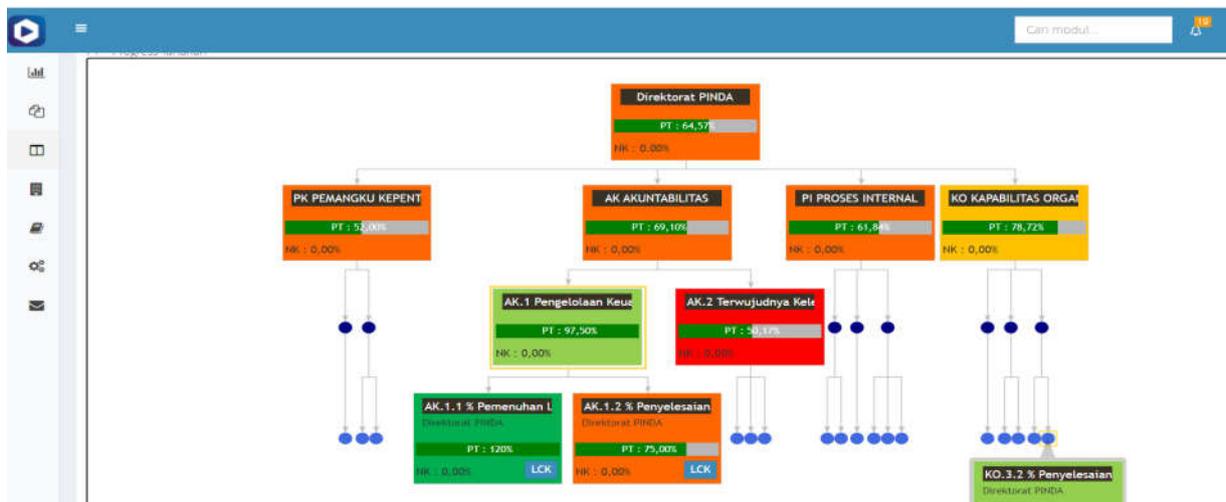
Surat Tugas No : 1781/PID.03/30-32/10/2020
Tanggal ST : 1 Oktober 2020

| No. | NAMA | NPP | JABATAN | JABATAN DALAM TUGAS |
|-----|------------------------|---------|---|----------------------------------|
| 1. | Riki Arif Gunawan | 0002254 | Direktur Pengolahan Informasi & Data | Pengarah |
| 2. | Indira Malik | 0000060 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Utama | Penanggung Jawab Kegiatan |
| 3. | Muhammad Ferdiansyah | 0000790 | Kepala Bagian Perencanaan Strategis, Organisasi & Tatalaksana | Manajer Kinerja Organisasi (MKO) |
| 4. | Kartika Ayu Lestari | 0001813 | Spesialis Muda 2 | Walidata Kinerja Organisasi |
| 5. | Sri Sembodo Adi | 0000377 | Kepala Bagian Administrasi Perkantoran | Walidata Kinerja Biro Umum |
| 6. | Rachmawati | 0001020 | Arsiparis Muda | Walidata Kinerja Biro Umum |
| 7. | Primba Ismawan | 0001546 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Aplikasi |
| 8. | Primaningtyas Sukawati | 0001894 | Spesialis Muda 2 | PIC Aplikasi |
| 9. | Palambas Samosir | 0001431 | Data Entry | PIC Aplikasi |
| 10. | Lamini | 0001436 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Dashboard |
| 11. | Siti Raykah | 0001038 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Dashboard |

Gambar 2 Anggota TIm Efektif

PEMBANGUNAN DASHBOARD APLIKASI KINERJA

Dashboard yang dibangun mengikuti struktur kontrak kinerja KPK yang terbagi dalam 4(empat) perspektif, masing-masing Pemangku Kepentingan, Akuntabilitas, Proses Internal dan Kapabilitas Organisasi.



Gambar 3 Layar Dashboard Kinerja Unit Kerja

PEMBAHASAN IKU DIREKTORAT PINDA DAN BIRO UMUM

Untuk dapat mengidentifikasi IKU mana yang dapat diotomasi penghitungannya, maka tim bersama-sama mengidentifikasi, memetakan dan menganalisa ukuran kinerja yang digunakan dengan melihat deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber informasinya.

Jenis Sumber data IKU dapat dibagi menjadi :

- **Otomatis**

Kriteria ini merupakan segala sumber data yang dapat diperoleh dari Aplikasi TI yang dimiliki oleh KPK. Contoh : Realisasi project – sumber data : Aplikasi Open Project

- **Semi otomatis**

Kriteria ini merupakan segala sumber data yang tidak dapat diperoleh dari aplikasi TI yang dimiliki oleh KPK. Namun demikian, sumber data tersebut telah dihasilkan dan dilaporkan untuk setiap proses kerja. Contoh : Tindak lanjut audit

- **Manual (Non Elektronik)**

Kriteria ini merupakan segala sumber data yang tidak dapat diperoleh dari aplikasi TI yang dimiliki oleh KPK. Selain itu, sumber data tersebut belum dihasilkan dan dilaporkan untuk setiap proses kerja yang dimaksud. Contoh data CPI atau hasil survey

Dari pemetaan tersebut bisa disusun tabel berikut :

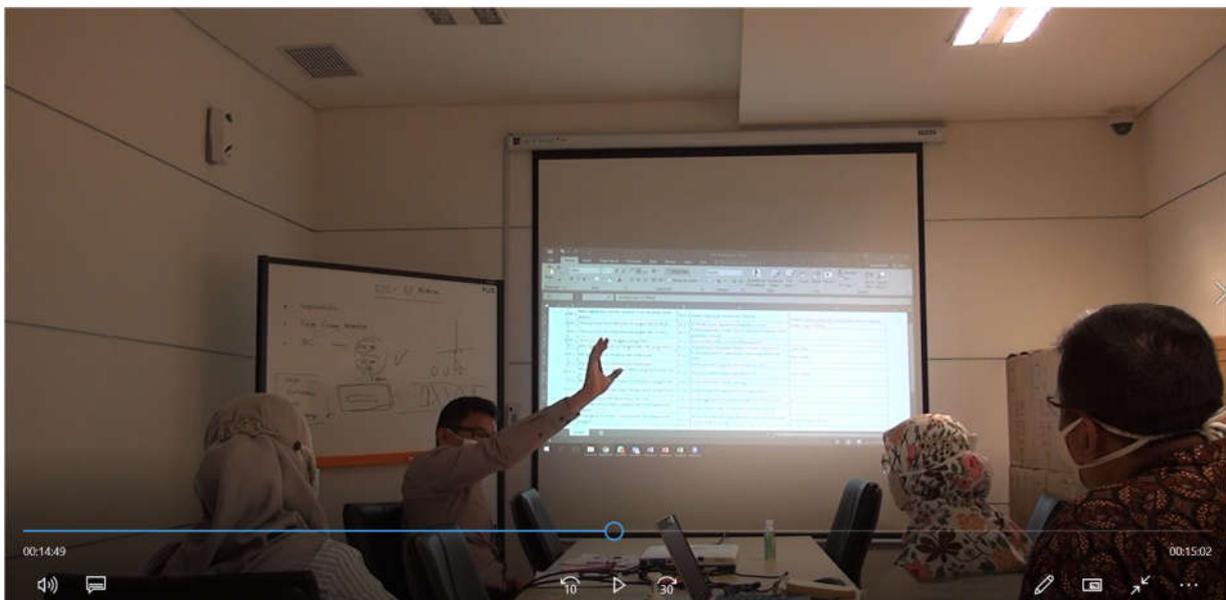
| | | Fully automatis | Semi automatis | Manual | |
|---|--|-----------------|----------------|--------|----|
| | Direktorat Pengolahan Informasi dan Data | | | | |
| 1 | Persepektif Pemanku Kepentingan | 4 | - | = | |
| 2 | Perspektif Akuntabilitas | 1 | | 4 | |
| 3 | Perspektif Proses Internal | 3 | | 3 | |
| 4 | Perspektif Kapabilitas Organisasi | 1 | 2 | 2 | |
| | Jumlah | 9 | 2 | 9 | 20 |
| | Biro Umum | | | | |
| 1 | Persepektif Pemangku Kepentingan | 1 | | 1 | |
| 2 | Perspektif Akuntabilitas | 1 | | 2 | |
| 3 | Perspektif Proses Internal | | 1 | 4 | |
| 4 | Perspektif Kapabilitas Organisasi | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|--|--------|---|---|---|----|
| | Jumlah | 3 | 3 | 8 | 14 |
|--|--------|---|---|---|----|

Pada Direktorat Pinda terdapat 9 (Sembilan) IKU yang dapat diotomasi penghitungannya, masing-masing IKU yang rawa datanya dari Aplikasi Open Project dan dari Aplikasi HRIS (Human Resources Information System). Pada Biro Umum semula hanya satu IKU yang bisa diotomasi penghitungannya, namun karena Biro Umum bersedia menggunakan open proect untuk 2(dua) IKU nya yang berbasis project, maka jadi ada 3 iKU yang dapat diotomasi.

Beberapa aplikasi yang berpotensi sebagai sumber raw data untuk otomasi :

- Aplikasi Open Project
- Aplikasi HRIS
- Aplikasi STINKO (Kesekjenan)
- Aplikasi E-LHKPN
- Aplikasi SIG (SI Gratifikasi)
- Aplikasi Sinergi (Penindakan)
- Aplikasi JAGA (Pencegahan)
- Aplikasi SPDP Online (Koordinasi dan Supervisi Penindakan)



Gambar 4 Pembahasan dengan Kepala Biro Umum dan Tim



Gambar 5 Pembahasan dengan Direktur Pinda

PEMBAHASAN PERATURAN PIMPINAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KPK.

Pembahasan bersama dilakukan bersama dengan :

- Kepala Bagian Perencanaan Strategis, Organisasi dan Tata Laksana sebagai Manajer Kinerja Organisasi
- Kepala Bagian Administrasi Perkantoran sebagai Walidata Kinerja dan Organisasi
- Kepala Satgas Tata Kelola sebagai Walidata Kinerja Direktorat Pinda
- Anggota Tim Efektif lainnya.

Secara umum Kontrak Kinerja (KK) terdiri atas empat bagian, yaitu: 1) Pernyataan Kesanggupan 2) Peta Strategi, 3) Target Kinerja dan 4) Dukungan Anggaran.

Pernyataan Kesanggupan merupakan lembaran yang berisi pernyataan bahwa pimpinan organisasi (pemilik Kontrak Kinerja), menyanggupi Target Kinerja yang dibebankan kepadanya beserta sumber daya pendukung yang telah disepakati dengan atasan langsungnya.

Peta Strategi merupakan visualisasi dan strategi yang dibangun oleh organisasi yang menggambarkan hubungan kausalitas antar Sasaran Strategis dalam berbagai Perspektif Peta Strategi pada tingkat organisasi yang lebih tinggi. Unit kerja yang memiliki Peta Strategi adalah unit kerja yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas dan/atau memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal dan output/ outcome), yang pada Komisi diterjemahkan menjadi unit kerja pada tingkat Kedeputian/Sekretariat Jenderal dan Direktorat/Biro. Peta Strategi Komisi mengacu pada dasar AKU yang telah ditetapkan. Pimpinan dan para Deputi/Sekretaris Jenderal mengadakan Rapat Pimpinan Terbatas untuk merumuskan Peta Strategi Komisi. Peta Strategi pada tingkat organisasi lebih rendah harus mengacu pada Peta Strategi tingkat organisasi yang lebih tinggi.

Target Kinerja terdiri dari Indeks Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis. IKU adalah ukuran keberhasilan Komisi dalam mencapai tujuan (visi) dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi. IKU harus memiliki unsur yaitu Target IKU, Trajectory IKU, dan Manual IKU. Inisiatif Strategis (IS) adalah ide/gagasan/ langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai target IKU.

Dukungan Anggaran merupakan dokumen yang memberikan informasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai Target Kinerja. Pada Kontrak Kinerja dibutuhkan perencanaan terkait anggaran yang akan digunakan dalam mencapai target kinerja.

Indeks Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan Komisi dalam mencapai tujuan (visi) dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan

Dari pembahasan sumber IKU ini kemudian dianggap perlu untuk memperbaiki kebijakan yang ada , dalam hal ini Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya pada Pasal 24 dan pada Lampiran II bagian 3.

Perubahan kebijakan dimaksudkan agar : Pertama, aplikasi manajemen kinerja ini digunakan sebagai sumber informasi resmi manajemen kinerja. Kedua , untuk IKU yang datanya sudah tersedia dalam aplikasi operasional, datanya tidak lagi dihitung manual dan di entry ke sistem, namun sudah terotomasi dan diambil dari aplikasi.

Pada tanggal 3 November 2020 telah dikirimkan nota Dinas dari Deputi Informasi dan Data kepada Sekretaris Jenderal.(terlampir)

PERMASALAHAN DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASINYA

Untuk menjalankan proyek perubahan ini, adalah beberapa kondisi di lapangan yang menjadi kendala baik yang bersifat teknis maupun substantif

| Kendala | | Solusi yang dilaksanakan |
|---------|---|---|
| | Kendala Teknis | |
| 1 | Situasi Pandemi Covid yang menyebabkan terjadinya pembatasan pertemuan | Pembahasan dilakukan menggunakan video meeting (zoom) maupun whats app group call |
| 2 | Waktu yang terbatas mengingat kesibukan untuk menyelesaikan kegiatan hingga akhir tahun | Meminta bantuan nara sumber untuk membantu diskusi kelompok terbatas dan menyusun Draft perubahan Peraturan Pimpinan tentang SAK |
| | Kendala Substantif | |
| 2 | Kurangnya dukungan dari Unit kerja lain dalam melakukan tahapan proyek perubahan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Tugas (dari Deputi Informasi dan Data) untuk pembentukan Tim Efektif lintas unit kerja 2. Mendatangi langsung pimpinan unit kerja dan menyampaikan gagasan proyek perubahan beserta manfaatnya. |
| 3 | Penayangan dashboard di layar yang disediakan di ruang kerja pegawai menjadi tidak efektif karena banyak pegawai bekerja dari rumah | Pembukaan akses aplikasi ke semua pegawai tanpa mensyaratkan registrasi, cukup dengan menggunakan akun yang disediakan lembaga untuk akses ke semua sistem yang digunakan di lembaga |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

STRATEGI PROSES MARKETING

Implementasi strategi marketing proyek perubahan Strategi marketing sektor publik yang dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah dengan Pembauran Marketing (Marketing Mix), yaitu strategi 4P +1C (product, price, place, promotion, costumer).

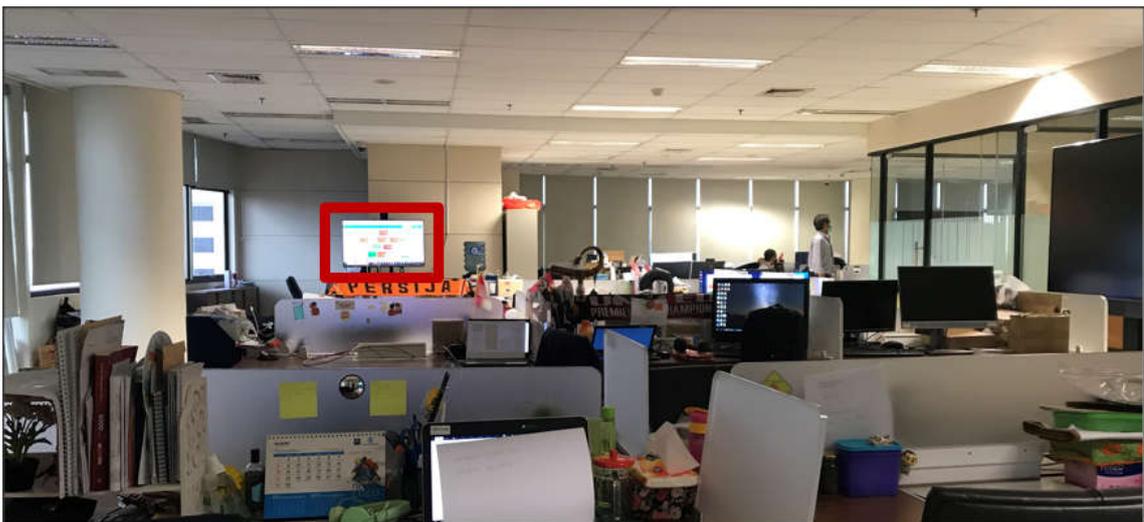
Rincian strategi marketing sector public yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. **Product** : Merupakan modul dalam Aplikasi STINKO (Sistem Terintegrasi Internal Komisi) yang merupakan hasil dari proyek perubahan yang dapat menyelesaikan masalah. Selain Modul dan Aplikasi penulis juga membuat draft untuk penyempurnaan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK

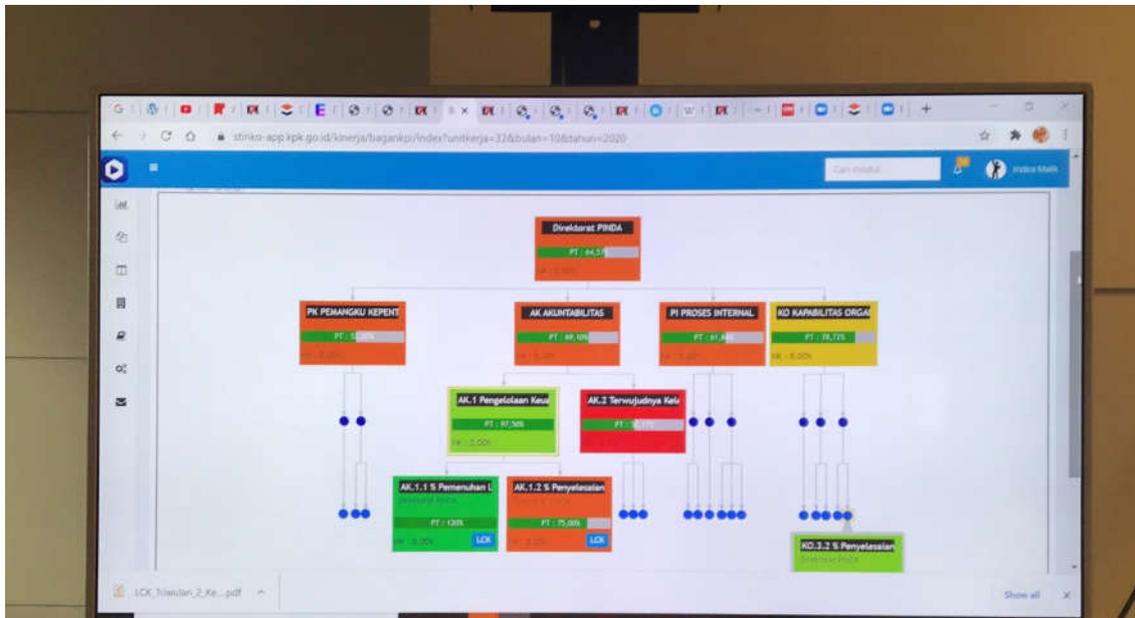
b. **Place** : dalam hal ini adalah tempat untuk melakukan marketing dari produk. Modul diteloh dipaparkan di depan Deputi Informasi dan Data dan Dewan Pengawas KPK.

Selain itu modul juga telah ditayangkan di ruang kerja pegawai sehingga semua pegawai diharapkan bisa melihat capaian kinerja unitnya.

Namun, mengingat masa Pandemi, dimana sebagian besar pegawai bekerja dari rumah. Maka penempatan di aplikasi dibuka lebih luas, dengan mengizinkan semua pegawai (tanpa harus melalui proses registrasi) dapat melihat dashboard capaian kinerja melalui komputer nya yang telah terhubung dengan jaringan kantor melalui VPN (*Virtual Private Network- secure network*)



Gambar 6 Penayangan dashboard di ruang kerja



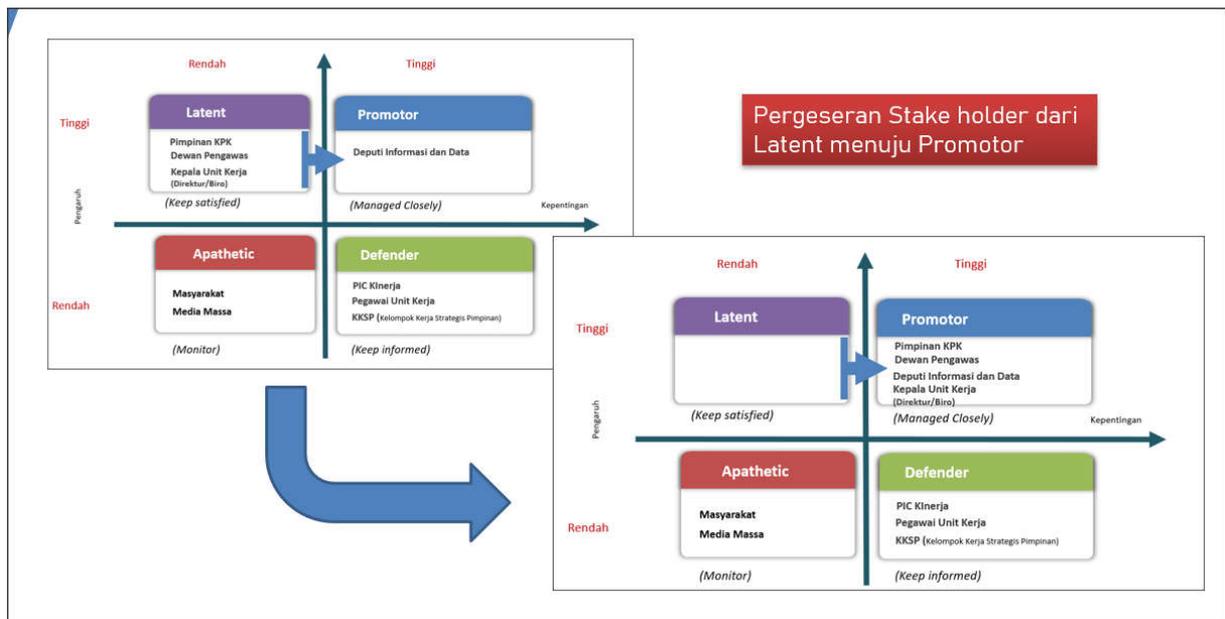
Gambar 7 TV Dashboard di ruang kerja

- c. **Price:** pada kegiatan marketing sektor publik ini tidak hanya terbatas pada biaya, tetapi juga termasuk dalam hal ini kesediaan, dukungan dan komitmen dari para stakeholder dalam mendukung proyek perubahan ini.
- d. **Promotion:** strategi komunikasi yang digunakan diharapkan dapat menjangkau semua stakeholder terutama Pimpinan , Dewan Pengawas, Pegawai dan Masyarakat. Penayangan untuk masyarakat ditunda sampai milestone Jangka menengah ketika dashboard ini sudah mencapai KPK- Wide. Namun paparan kepada Dewan Pengawas telah dilakukan kdn mendapat respons positif dari Dewan Pengawas, bahkan ada beberapa usul untuk perbaikan aplikasi ini

PERUBAHAN DUKUNGAN STAKEHOLDER

Untuk melakukan promosikan yang tepat sasaran, telah dilakukan pemetaan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek perubahan. *Stakeholder* dalam proyek perubahan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : Lantent, Promotor, Apathetic dan Defender.

Dengan dialog strategis yang dibangun perubahan yang ditawarkan telah dapat meyakinkan *stakeholder* yang semula berada di kelompok **Latent** bergabung masuk menjadi kelompok **Promotor** yang mendukung inisiatif pembangunan Dashboard Kinerja ini.



Gambar 8 Diagram perubahan peta stakeholder

Pada tanggal 2 Desember 2020, akhirnya reformer mendapat kesempatan untuk presentasi ke Pimpinan KPK . Paparan dihadiri oleh 2(dua) orang Pimpinan KPK yaitu Bapak Nurul Ghufrom dan Paka Laexander Marwata, Bapak Deputi Informasi dan Data dan Bapak Direktur Pengolahan Informasi dan Data



Gambar 9 Paparan ke Pimpinan

Berikut beberapa testimoni dari Bapak Nurul Ghufron salah satu Pimpinan KPK yang membawahi Deputy Informasi dan Data

“Terima kasih, KPK menyambut baik rencana proyek peningkatan dan quality improvement yang sedang dicanangkan oleh Ibu Indira Malik dalam rangka untuk memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kinerja. Dengan dashboard ini KPK tentu semakin solid bahwa arah kinerja KPK itu mengarah kepada capaian Arah Kebijakan Umum melalui strategi yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada Ibu Indira Malik. Wassalamu alikum warahmatullahi wabarakatuh”

Setbelumnya, setelah dashboard dibuat, pada tanggal 23 November 2020, dashboard dipresentasikan ke Dewan Pengawas KPK. Presentasi dilakukan di depan 5(lima) anggota Dewas, Sekretariang Dewas, beberapa anggota Kelompok Jabatan Fungsional(KJF) yang membantu Dewas dalam pengawasan Kinerja, Deputy Informasi dan Data, Direktur Pengolahan Informasi dan Data beserta Tim Pinda.



Gambar 10 Paparan kepada Dewan Pengawas

Berikut beberapa tanggapan dari Anggota Dewan Pengawas

Syamsudin Haris (Anggota Dewan Pengawas KPK) :

“Kami di Dewas telah dipaparkan Dashboard informasi kinerja. Dan itu sangat bermanfaat bagi Dewas, karena tugas Dewas adalah mengevaluasi kerja Pimpinan dan pegawai KPK.

Dashboard dibutuhkan untuk mendalami sejauh mana LCK capaian setiap elemen di KPK mulai KPK Wide sampai KPK three- betul-betul didasarkan pada KPI yang dimiliki oleh masing-masing. Entah itu pada level unit institusi maupun pada level individual “

Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas KPK) :

“Aplikasi yang dibangun oleh Mbak Indira ini menurut kami sudah cukup bagus. Dimana di dalam aplikasi ini untuk kami Dewan Pengawas itu lebih memudahkan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja institusi dalam hal ini Kinerja KPK. Untuk itu juga perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu sebagai masukan”

Yang pertama adalah, kalau kami lihat dari system itu belum ada attachmentnya, jadi perlu. Sementara untuk pembuktian itu memerlukan evidence untuk yang secara elektronik terkoneksi

dan perlu juga ditambahkan attachmentnya itu supaya bisa dimasukkan evidence evidence yang diperlukan.

Kemudian yang kedua, di KPK ini juga ada aplikasi yang menilai kinerja dari pegawai. Nah ini juga perlu jadi ada hubungannya antara yang (dashboard kinerja) yang dibangun di STINKO (Sistem Terintegrasi Internal Komisi) ini. Dengan aplikasi untuk penilaian evaluasi kinerja, sehingga bisa tercermin bahwa penilaian individu pegawai itu juga bisa masuk ke penilaian organisasi , dalam hal ini KPK.”

BAB 4 PENUTUP

KESIMPULAN

Selama implementasi proyek perubahan ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis, yaitu:

- Semua terobosan inovatif dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu karena aliber dukungan dan bantuan dari para stakeholder;
- Perubahan ini membawa manfaat bagi beberapa pihak seperti : Dewan Pengawas, Pimpinan dan Struktural yang mempunyai fungsi pengawasan
- Otomasi sumber informasi kinerja menguntungkan bagi PIC Kinerja karena mengurangi pekerjaan yang sifatnya klerikal dan menghabiskan sumber daya
- Otomasi sumber informasi kinerja juga meningkatkan akuntabilitas di KPK dengan mengurangi peluang “mencurangi” nilai capaian kinerja karena angka dihasilkan oleh sistem

REKOMENDASI

- Perlu perubahan dari Peraturan Pimpinan tentang Sistem akuntabilitas kinerja untuk mengakomodasi otomasi sumber informasi dari dashboard kinerja dan laporan capaian kinerja.
- Piloting dua Unit kerja ini harus segera diluaskan ke seluruh unit kerja di KPK.
- Segera setelah seluruh unit kerja menggunakan modul ini , maka kinerja KPK widw dapat dihitung dari aplikasi dan bisa ditayangkan ke Publik.
- Direktorat Pinda perlu mengotomasi lebih banyak lagi penanganan proses bisnis (menyediakan aplikasi pendukung) sehingga dimungkinkan lebih banyak lagi sumber informasi kinerja yang terotomasi.

LESSON LEARNT

- Pemimpin perlu mengetahui dengan detail. Setelah menganalisa IKU yang ada di unit kerja Piloting ,

- Perubahan perlu dicontohkan. Penggunaan software manajemen project di KPK baru di Unit kerja Direktorat Pinda. Setelah dipresentasikan ke Biro Umum, mereka baru menyadari bahwa ada cara yang lebih mudah untuk melakukan reporting dan monitoring progres.
- Peran komunikasi ke Leader organisasi itu penting untuk mendapatkan komitmen dari anggotanya.
- Pemilihan KPI yang benar , sangat berpengaruh terhadap capaian tujuan utama organisasi. Dengan adanya otomasi maka
- Penggunaan sistem berbasis TI akan meningkatkan akuntabilitas dan integritas organisasi.
- Apa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa otomasi KPI itu sangat mungkin untuk dilakukan. Tahun depan dengan berubahnya kembali renstra KPK , maka ada kemungkinan

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Tahapan kegiatan proyek perubahan..... | 19 |
| Gambar 2 Anggota Tim Efektif..... | 20 |
| Gambar 3 Layar Dashboard Kinerja Unit Kerja | 20 |
| Gambar 4 Pembahasan dengan Kepala Biro Umum dan Tim..... | 22 |
| Gambar 5 Pembahasan dengan Direktur Pinda..... | 23 |
| Gambar 6 Penayangan dashboard di ruang kerja..... | 27 |
| Gambar 7 TV Dashboard di ruang kerja | 28 |
| Gambar 8 Diagram perubahan peta stakeholder | 29 |
| Gambar 9 Paparan ke Pimpinan..... | 30 |
| Gambar 10 Paparan kepada Dewan Pengawas | 31 |

DAFTAR BUKTI KEGIATAN :

SK TIM EFEKTIF PEMBANGUNAN DASHBOARD KINERJA KPK


**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
SURAT TUGAS
Nomor : 1781/PID.03/30-32/10/2020

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Menimbang :

- 1. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK, perlu disiapkan perangkat pendukung yang memungkinkan pemantauan kinerja berkelanjutan (continuous monitoring) dan kebijakan yang mengatur tata kelolanya
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas.

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama - nama terlampir

Untuk : Pembangunan Dashboard Kinerja KPK

Tempat dan Waktu : Gedung Merah Putih KPK, DKI Jakarta
Kamis, 1 Oktober 2020 sampai dengan Kamis, 31 Desember 2020.

Biaya : Biaya selama melaksanakan tugas dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan kepada pihak dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Ditandatangani di Jakarta
Tanggal 1 Oktober 2020
a.n. Pimpinan
Komisi Pemberantasan Informasi Dan Data,

Mochamad Hadiyana


http://www.kpk.go.id

Sembutan
1. YB. Pimpinan KPK,
2. YB. Deputi PPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

Lampiran

Surat Tugas No : 1781/PID.03/30-32/10/2020
Tanggal ST : 1 Oktober 2020

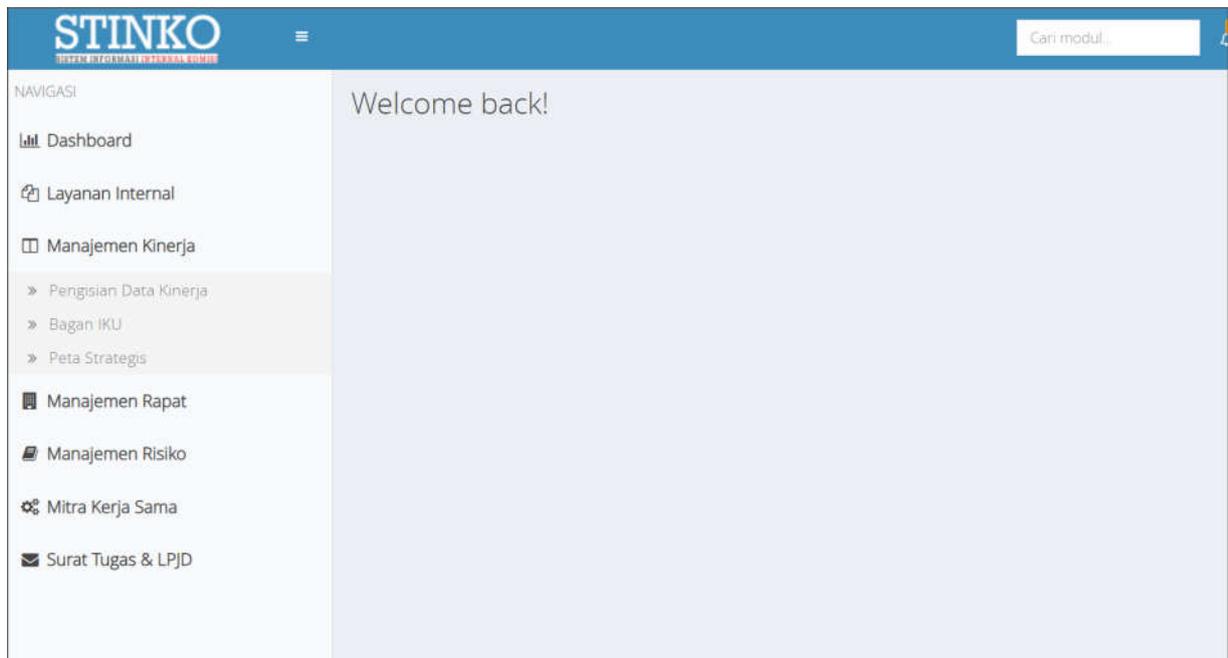
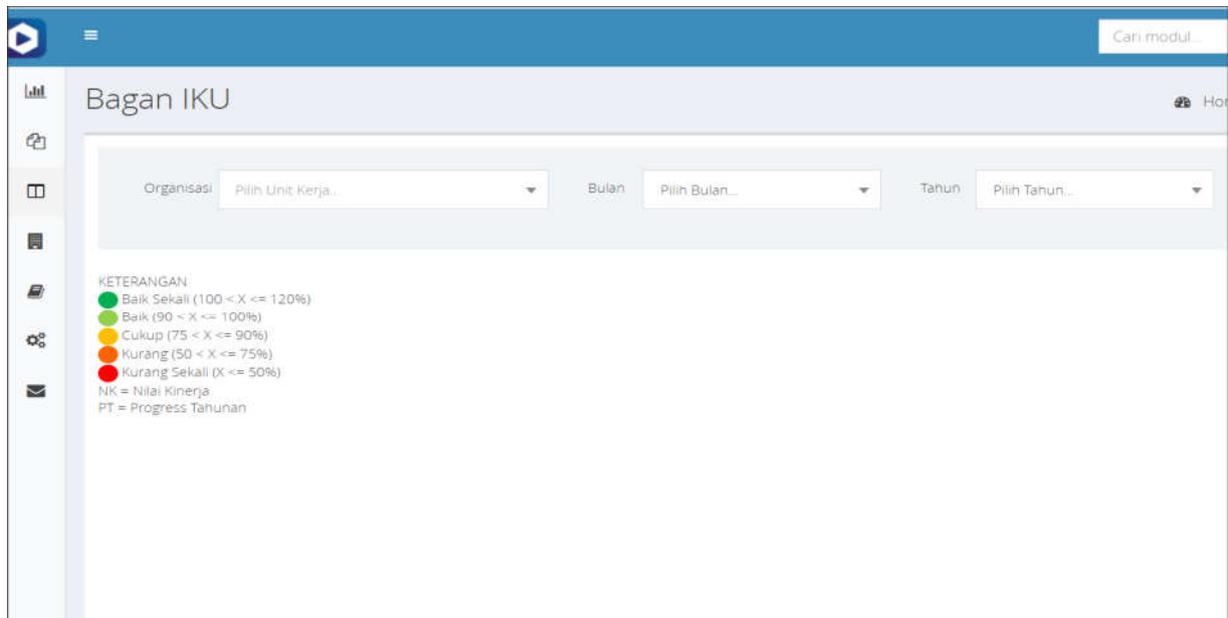
| No. | NAMA | NPP | JABATAN | JABATAN DALAM TUGAS |
|-----|------------------------|---------|---|----------------------------------|
| 1. | Riki Arif Gunawan | 0002254 | Direktur Pengolahan Informasi & Data | Pengarah |
| 2. | Indira Malik | 0000060 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Utama | Penanggung Jawab Kegiatan |
| 3. | Muhammad Ferdiansyah | 0000790 | Kepala Bagian Perencanaan Strategis, Organisasi & Tatalaksana | Manajer Kinerja Organisasi (MKO) |
| 4. | Kartika Ayu Lestari | 0001813 | Spesialis Muda 2 | Walidata Kinerja Organisasi |
| 5. | Sri Sembodo Adi | 0000377 | Kepala Bagian Administrasi Perkantoran | Walidata Kinerja Biro Umum |
| 6. | Rachmawati | 0001020 | Arsiparis Muda | Walidata Kinerja Biro Umum |
| 7. | Primba Ismawan | 0001546 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Aplikasi |
| 8. | Primaningtyus Sukawati | 0001894 | Spesialis Muda 2 | PIC Aplikasi |
| 9. | Palambas Samosir | 0001431 | Data Entry | PIC Aplikasi |
| 10. | Lamini | 0001436 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Dashboard |
| 11. | Siti Raykah | 0001038 | Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda | PIC Dashboard |

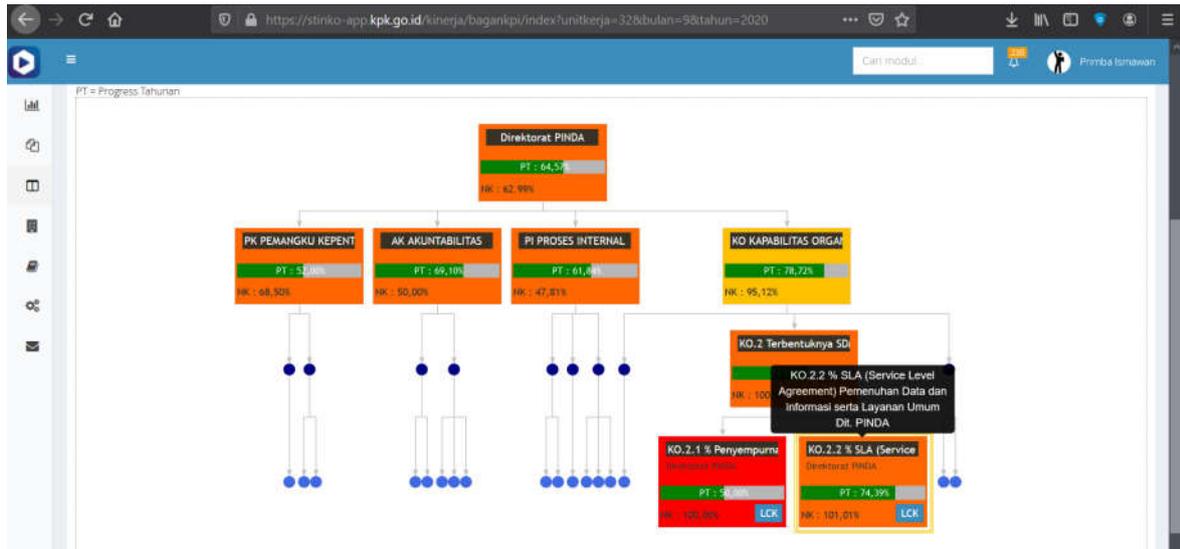
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Informasi dan Data,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Mochamad Hadiyana

TAMPILAN LAYAR MODUL APLIKASI KINERJA DAN DASHBOARD KINERJA





STINKO Pengisian Data Kinerja

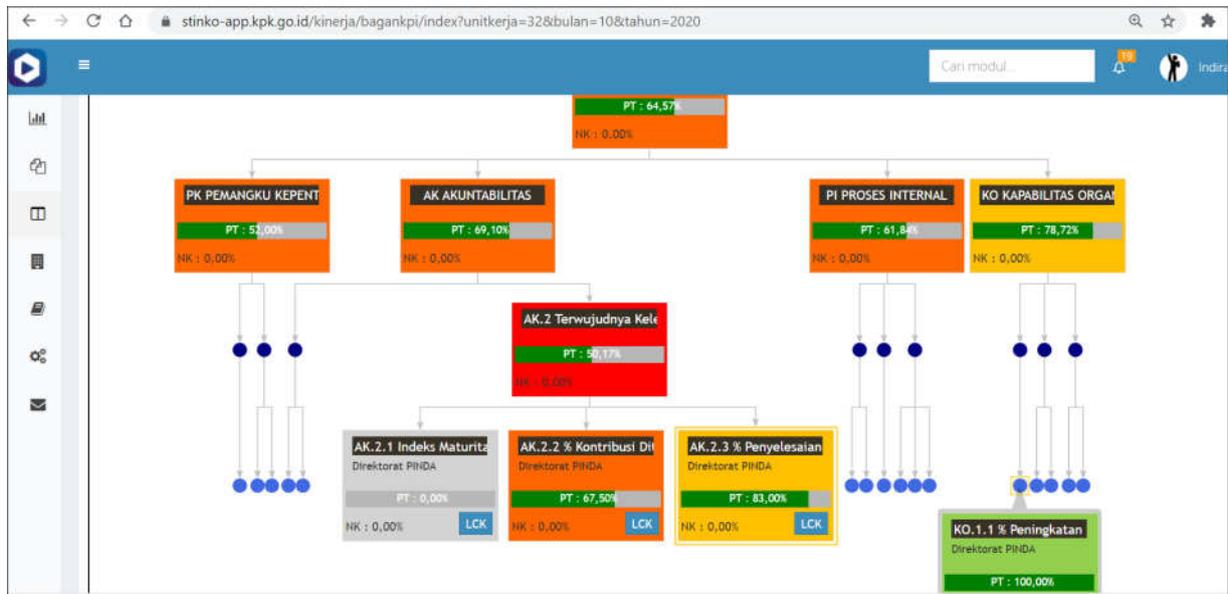
Organisasi: Direktorat PINDA Tahun: 2020

Status LCK: Lock

LNKO (Laporan Nilai Kinerja Organisasi)

| | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | 1 Tahun |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 109.97% | 81.12% | 86.65% | 0.00% | 64.57% |

| Nama | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | Bobot (%) |
|---|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| PK PEMANGKU KEPENTINGAN | - | - | 120,00 | - | - | 75,00 | - | - | 68,50 | - | - | 0,00 | 25 |
| PK.1 Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif | - | - | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | 112,00 | - | - | 0,00 | 50 |
| PK.1.1 % Pembangunan Sistem Database, Telekomunikasi, dan Informatika | 5,00 | 7,17 | 120,00 | 10,00 | 13,50 | 120,00 | 15,00 | 16,80 | 112,00 | 20,00 | - | - | 21 |



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TW. II 2020
Direktorat PINDA

| | | SS | | | | | : KO.3 MEMANFAATKAN ANGGARAN TEPAT SASARAN DAN MENGUATKAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG TERKELOLA DAN TERUKUR |
|---|------------|--|--------|--------|---------|--------|--|
| | | IKU | | | | | : Indeks Pengelolaan Keuangan Direktorat Pinda |
| | Q1 | Q2 | Sm. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Keterangan |
| Target | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | |
| Realisasi | 56,60% | 53,30% | 53,30% | - | 0,00% | - | |
| Capaian | 59,58% | 56,11% | 56,11% | - | 0,00% | - | |
| Realisasi (Y-1) | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | Diisi kecuali IKU baru |
| Perbandingan (Y:Y-1) | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| Target Renstra | - | - | - | - | - | - | |
| Realisasi IKU Renstra | [REDACTED] | | | | | | Korporat wajib mengisi |
| Realisasi Standar Nasional | - | - | - | - | - | - | Diisi jika ada data |
| Komparasi Standar Nasional | - | - | - | - | - | - | |
| Kendala/Hambatan/Akar Masalah capaian kinerja | | Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Mempertanggungjawabkan Uang Muka yang tepat waktu - Melaksanakan penyerapan anggaran dengan optimal dan - Memeriksa penggunaan anggaran - Membuat skenario penggunaan anggaran tambahan/hibah dari unit | | | | | |

UNDANGAN ZOOM MEETING

Helpdesk IT | Indira Malik; Helpdesk IT ▾ 02/11/2020

HI RE: pemesanan zoom

Berikut informasi meeting via zoom :

Topic: Pembahasan dashboard kinerja KPK
Time: Nov 19, 2020 08:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/83920577976>

Meeting ID: 839 2057 7976
Passcode: Vu8tjQ16

Aturan meeting standar (participant harus sign in dan di approve dulu oleh host untuk dapat join meeting).
Untuk yang menjadi host mohon join 10 menit sebelum meeting dimulai.
Terima kasih.

Hormat kami,
Helpdesk IT KPK
Ext : 8433 | helpdeskit@kpk.go.id | 07.00 – 20.00
Untuk layanan IT silakan akses <http://tiket-it>

Helpdesk IT | Indira Malik; Helpdesk IT ▾ Thu 26

HI RE: zoom meeting

Berikut informasi meeting via zoom :

Topic: Kebijakan terkait Dashboard Kinerja
Time: Nov 26, 2020 08:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/88347611951>

Meeting ID: 883 4761 1951
Passcode: 8gtwYtEk

Aturan meeting standar (participant harus sign in dan di approve dulu oleh host untuk dapat join meeting).
Untuk yang menjadi host mohon join 10 menit sebelum meeting dimulai.
Terima kasih.

Hormat kami,
Helpdesk IT KPK
Ext : 8433 | helpdeskit@kpk.go.id | 07.00 – 20.00
Untuk layanan IT silakan akses <http://tiket-it>

DOKUMENTASI ZOOM MEETING

| % SLA (Service Level Agreement) Pemenuhan Data dan Informasi serta Layanan Umum Dit. Pinda | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|--|---|-----------------------|--------|
| Perspektif | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Kategori | Formula / Model | Sumber Informasi | Keterangan | |
| | | | | | | | KITI |
| KAPABILITAS ORGANISASI | SS.9 | Membangun Sistem Operasional dan Data Informasi Terintegrasi yang Adaptif | KPI. 17/ KO.2.1 | % Penyempurnaan Proses Bisnis Dit. Pinda | $(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah Satuan Tugas Direktorat Pinda yang telah mengidentifikasi Peta Proses Bisnis dan SOP/Lampiran yang tersedia saat ini untuk dilakukan rekomendasi / penyusunan perbaikan berdasarkan Pedoman Penataan Proses Bank Baru b = Jumlah Satuan Tugas | Data dari RO | |
| | | | KPI. 18/ KO.2.2 | % SLA (Service Level Agreement) Pemenuhan Data dan Informasi serta Layanan Umum Dit. Pinda | $(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah penyelesaian permintaan/layanan yang sesuai SLA b = Jumlah keseluruhan layanan yang dibarkan | Tiket | |
| | SS.10 | Memfaatkan Anggaran Tepat Sasaran dan Mengusulkan Pengendalian Internal yang Bertindak dan Terukur | KPI. 19/ KO.3.1 | Indeks Pengelolaan Keuangan Dit. Pinda | $(1/30 + 2/10 + 3/20 + 4/40)$ 1. Jumlah pertanggungjawaban UM tepat waktu / Kurang atau sampai dengan lima hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan 2. Jumlah penyelesaian data kontrol tepat waktu / Kurang atau sampai dengan lima hari kerja | SAKTI / ST | |
| | | | KPI. 20/ KO.3.2 | % Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Internal (PI) Dit. Pinda | $(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah rencana aksi yang telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke PI di tingkat Direktorat Pinda b = Jumlah seluruh rekomendasi atas temuan Dir. PI di tingkat Direktorat Pinda (Peta STNKO, Modul Manajemen | Data dari RO / STINKO | Manual |

The screenshot shows the OpenProject interface with a sidebar menu on the left and a main table of project tasks. The sidebar menu includes categories like '2019 - Project JAGA', '2019 - 10 Departemen Pengolahan', '2019 - 15 DIT. LITBANG', '2019 - 16 UK PEA', '2019 - 17 DIT. PINDA', '2020 - 18 DIT. PINDA', '2020 - 19 DIT. PINDA', '2020 - 20 DIT. PINDA', '2020 - 21 DIT. PINDA', '2020 - 22 DIT. PINDA', '2020 - 23 DIT. PINDA', '2020 - 24 DIT. PINDA', '2020 - 25 DIT. PINDA', '2020 - 26 DIT. PINDA', '2020 - 27 DIT. PINDA', '2020 - 28 DIT. PINDA', '2020 - 29 DIT. PINDA', '2020 - 30 DIT. PINDA', '2020 - 31 DIT. PINDA', '2020 - 32 DIT. PINDA', '2020 - 33 DIT. PINDA', '2020 - 34 DIT. PINDA', '2020 - 35 DIT. PINDA', '2020 - 36 DIT. PINDA', '2020 - 37 DIT. PINDA', '2020 - 38 DIT. PINDA', '2020 - 39 DIT. PINDA', '2020 - 40 DIT. PINDA', '2020 - 41 DIT. PINDA', '2020 - 42 DIT. PINDA', '2020 - 43 DIT. PINDA', '2020 - 44 DIT. PINDA', '2020 - 45 DIT. PINDA', '2020 - 46 DIT. PINDA', '2020 - 47 DIT. PINDA', '2020 - 48 DIT. PINDA', '2020 - 49 DIT. PINDA', '2020 - 50 DIT. PINDA', '2020 - 51 DIT. PINDA', '2020 - 52 DIT. PINDA', '2020 - 53 DIT. PINDA', '2020 - 54 DIT. PINDA', '2020 - 55 DIT. PINDA', '2020 - 56 DIT. PINDA', '2020 - 57 DIT. PINDA', '2020 - 58 DIT. PINDA', '2020 - 59 DIT. PINDA', '2020 - 60 DIT. PINDA', '2020 - 61 DIT. PINDA', '2020 - 62 DIT. PINDA', '2020 - 63 DIT. PINDA', '2020 - 64 DIT. PINDA', '2020 - 65 DIT. PINDA', '2020 - 66 DIT. PINDA', '2020 - 67 DIT. PINDA', '2020 - 68 DIT. PINDA', '2020 - 69 DIT. PINDA', '2020 - 70 DIT. PINDA', '2020 - 71 DIT. PINDA', '2020 - 72 DIT. PINDA', '2020 - 73 DIT. PINDA', '2020 - 74 DIT. PINDA', '2020 - 75 DIT. PINDA', '2020 - 76 DIT. PINDA', '2020 - 77 DIT. PINDA', '2020 - 78 DIT. PINDA', '2020 - 79 DIT. PINDA', '2020 - 80 DIT. PINDA', '2020 - 81 DIT. PINDA', '2020 - 82 DIT. PINDA', '2020 - 83 DIT. PINDA', '2020 - 84 DIT. PINDA', '2020 - 85 DIT. PINDA', '2020 - 86 DIT. PINDA', '2020 - 87 DIT. PINDA', '2020 - 88 DIT. PINDA', '2020 - 89 DIT. PINDA', '2020 - 90 DIT. PINDA', '2020 - 91 DIT. PINDA', '2020 - 92 DIT. PINDA', '2020 - 93 DIT. PINDA', '2020 - 94 DIT. PINDA', '2020 - 95 DIT. PINDA', '2020 - 96 DIT. PINDA', '2020 - 97 DIT. PINDA', '2020 - 98 DIT. PINDA', '2020 - 99 DIT. PINDA', '2020 - 100 DIT. PINDA'.

| PERHAL | TIPE | STATUS | PELIMPAAHAN | ACCOUNTABLE | TANGGAL START | FINISH |
|--|-----------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| PTIA - Pengembangan SPPT 2020 | KEGADAIAN | In progress | Ardil Ibar | Indira Malik | 13 Dec 2019 | 12 Nov 2020 |
| PTIA - Pengembangan Aplikasi | PHASE | In progress | Minarti Napitupulu | Hapus nilai | 03 Mar 2020 | 30 Jun 2020 |
| PTIA - Bug Fixing | PHASE | In progress | Minarti Napitupulu | Hapus nilai | 10 Mar 2020 | 12 Nov 2020 |
| PTIA - Migrasi Data Perizindakan | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Implementasi Perizindakan | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Migrasi Data Monitor | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Implementasi Monitor | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Modul Kamus Monitor | TASK | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Modul Request | TASK | New | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Modul Belasan | TASK | New | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Dashboard SPPT | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| PTIA - Implementasi iCrews | PHASE | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| 10567 - 2020 Satgas PTIA - Testing | TASK | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| 10588 - 2020 Satgas PTIA - Implementasi Aplikasi | TASK | In progress | Ardil Ibar | Hapus nilai | - | - |
| 8444 - 2020 Satgas PTIA - Pengembangan STINKO | KEGADAIAN | In progress | Prinda Irawan | Indira Malik | 01 Apr 2020 | 30 Nov 2020 |
| 8394 - 2020 Satgas PTIA - Tahap 1 | PHASE | In progress | Hapus nilai | Hapus nilai | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 |
| 8597 - 2020 Satgas PTIA - Modul Kasanzen IKKP + UP Turun | TASK | In progress | Prinda Irawan | Hapus nilai | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 |

Dashboard Kinerja KPK **XLSX** ☆ 📄

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan Terakhir diedit 3 menit lalu

75% Rp 0,00 123 Arial 11 B I A

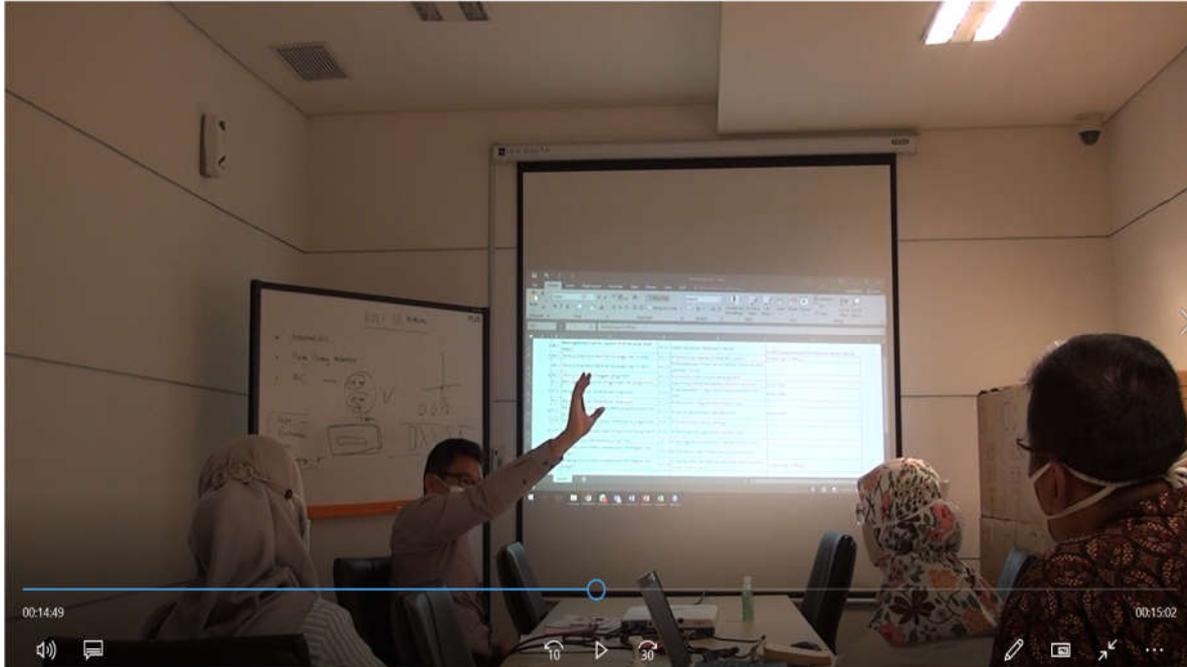
OpenProject

| Pegawai | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | i (Satgas) | | | Formula / Model | Sumber Informasi | |
|--------------|---|--|------------|-----|-----|--|--------------------------|---------|
| | | | TKT | OTI | KIT | | | |
| ANUMERANITAB | SS 4 Berikutnya Kelembagaan Yang Efektif | KPI 6 AK1.2 % Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di internal BPK di Pinda | Y | Y | Y | 100/100% 1. Jumlah tindak lanjut dari rekomendasi BPK yang dilaksanakan oleh unit kerja 2. Waktu penyelesaian rekomendasi data temuan BPK (Pada STIKO: Aktualisasi Manajemen Kinerja - Mengambil Data Kinerja) | Data dari RO / STINKO | Manual |
| | | KPI 7 AK2.1 Indeks Mutu dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK | Y | Y | Y | 100/100% 1. Jumlah keluhan SPBE yang ditanggapi oleh Biro melalui saluran komunikasi 2. Jumlah keluhan SPBE yang ditanggapi oleh Biro melalui saluran komunikasi 3. Jumlah keluhan SPBE yang ditanggapi oleh Biro melalui saluran komunikasi 4. Jumlah keluhan SPBE yang ditanggapi oleh Biro melalui saluran komunikasi | Data KerenpanRB / STINKO | Manual |
| | | KPI 8 AK2.2 % Kontribusi Dit. PINDA terhadap SPFP | Y | | | 100/100% + (1/20% + 2/20% + 3/20% + 4/20%) / 100% 1. Persentase kontribusi Dit. PINDA terhadap SPFP (20%) 2. Persentase kontribusi Dit. PINDA terhadap SPFP (20%) 3. Persentase kontribusi Dit. PINDA terhadap SPFP (20%) 4. Persentase kontribusi Dit. PINDA terhadap SPFP (20%) | Laporan SPFP / STINKO | Manual |
| | | KPI 9 AK2.3 % Penyelesaian Tindak Lanjut Pedoman Turunan SMO di Lingkup TK | Y | | | 100/100% 1. Jumlah pedoman turunan SMO yang diterbitkan oleh Biro 2. Jumlah pedoman turunan SMO yang diterbitkan oleh Biro 3. Jumlah pedoman turunan SMO yang diterbitkan oleh Biro | OpenProject | Otomasi |

Business Sheet - Pinda Business Sheet - Biro Umum Catatan Kerja Technical Sheet 1:45:14 Pelajari



PEMBAHASAN DENGAN BIRO UMUM



|  | | DAFTAR HADIR | | | |
|---|-------------------|---|--------|-------|---|
| Nama Acara Hari / Tanggal Waktu Tempat | | : Pembahasan Dashboard Kinerja Biro Umum : Senin, 16 November 2020 : 09.30 - Selesai : Ruang Rapat Biro Umum Lt. 5 | | | |
| No | Nama | Jabatan / Instansi | Telpon | Email | Tanda Tangan |
| 1. | Yonafren - D.T | Karo Umum KPK | 7164. | |  |
| 2 | Terar | | 8151 | |  |
| 3 | Sri Sembodo Adi | BKAR | | |  |
| 4 | Muwi Ramah | Rumga | | |  |
| 5. | Eko Septo Probowo | Rumga | 8174 | |  |
| 6 | Indira Mahu | Rumga | 8340 | |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PEMBAHASAN DENGAN DIREKTUR PINDA



DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan: Rik. KPR - Three Dik. Pinda Bulan Oktober 2020
 Tempat: Ruang 11.18
 Hari/Tanggal: Senin, 9 November 2020
 Mulai Pukul: 08.00 s.d. Pukul: 12.00

| No | Nama | Unit Kerja | No. Telepon / Email | Tanda Tangan |
|----|--------------|------------|---------------------|--------------|
| 1 | Riki A.G | PINDA | | |
| 2 | Indira Maula | Pinda | | |
| 3 | Eka Pratania | pinda | | |
| 4 | Jessica | Pinda | | |
| 5 | Andi Baston | Pinda | | |
| 6 | Abdul Hakim | pinda | | |
| 7 | Wawan S | Pinda | | |
| 8 | Winda AT | Pinda | | |
| 9 | Hentari DY | Pinda | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Nilai: _____
 Nomor Rubrik/Raport/Laporan/Pelaksanaan Tugas: _____

Menyetujui: _____
 Kepala Pusat Kustodian

Mengetahui: _____
 Kepala KPR

Panangung Jawab: _____
 Nama: Melani D.Y.
 Jabatan: _____

PAPARAN KE PIMPINAN KPK



PAPARAN KE DEWAN PENGAWAS



NOTA DINAS BAHAN PENYEMPURNAAN PERPIM SAK KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA

NOTA DINAS
Nomor 137 /PID.01/30-32/12/2020

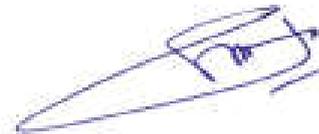
Kepada : Sekretaris Jenderal
Dari : Deputi Bidang Informasi dan Data
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Bahan Penyempurnaan Perpim Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK
Tanggal : 3 Desember 2020

Dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja KPK, Direktorat Pinda telah membangun modul manajemen kinerja pada Aplikasi STINKO dan telah mengkoneksikan antara modul manajemen kinerja dengan dengan aplikasi operasional lainnya sehingga beberapa data IKU pada Direktorat Pinda dan Biro Umum telah dapat disajikan lebih cepat dan lebih akurat karena diambil dari sumbernya langsung.

Agar perubahan ini dapat diterapkan ke seluruh unit kerja dan memiliki tata kelola yang baik, maka kami mengusulkan perubahan/penambahan pasal tentang aplikasi manajemen kinerja dan isi lampiran terkait sumber informasi indikator kinerja (terlampir) sebagai bahan penyempurnaan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya pada pasal 24 dan Lampiran II bagian 3.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menugaskan staf terkait untuk berkoordinasi dengan Sdri Indra Malik pada Direktorat Pengolahan Informasi dan Data.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mochamad Hadiyana

Usulan Revisi Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Latar Belakang

KPK memandang perlu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK dengan melakukan inisiatif program perubahan dalam bentuk otomatisasi perekaman realisasi kinerja pada aplikasi manajemen kinerja.

Otomatisasi perekaman realisasi kinerja diharapkan akan dapat mengurangi perekaman realisasi kinerja yang dilakukan secara entri manual dan digantikan dengan perekaman realisasi kinerja dilakukan secara sistem. Untuk itu perlu dilakukan penambahan ketentuan mengenai penggunaan hasil perekaman realisasi kinerja secara sistem.

Disamping itu, perlu dilakukan identifikasi sumber data dari setiap indikator kinerja untuk dapat dilakukan perekaman realisasi kinerja secara sistem. Dalam Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya pada Lampiran II bagian 3. Format Manual IKU terdapat komponen informasi tentang Sumber Data, namun belum terdapat pengaturan tentang hal tersebut di dalam batang tubuh Peraturan. Untuk itu perlu ditambahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian Sumber Data pada Manual IKU melalui revisi atau adendum atas peraturan tersebut.

Usulan Revisi

1. Perubahan Pasal

BAB V APLIKASI MANAJEMEN KINERJA Pasal 24 diubah menjadi sebagai berikut :

BAB V

APLIKASI MANAJEMEN KINERJA

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja dilaksanakan Manajer Kinerja sesuai tingkatan organisasinya.
- (2) Proses Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Perekaman Kontrak Kinerja
 - b. Perekaman Manual IKU; dan
 - c. Perekaman Realisasi Kinerja
- (3) Hasil Perekaman Realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) yang dilakukan melalui aplikasi manajemen kinerja digunakan dalam proses pelaporan dan evaluasi kinerja.
- (4) Jika dalam Perekaman Manual IKU sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) dinyatakan bahwa Sumber Data adalah Jenis Elektronik maka Perekaman

Realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) dilakukan secara sistem melalui aplikasi manajemen kinerja.

- (5) Data yang dihasilkan oleh Perekaman Realisasi Kinerja secara sistem sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperkenankan diubah secara manual.
- (6) Struktur Manajer Kinerja dan mekanisme penggunaan aplikasi manajemen Kinerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan Komisi ini.

2. Penambahan Lampiran

Lampiran II bagian 3. Format Manual IKU ditambahkan penjelasan mengenai tata cara pengisian setiap komponen informasi. Berikut ini usulan kami khusus untuk komponen **Sumber Data** :

Petunjuk Pengisian Manual IKU

| Informasi | Petunjuk Pengisian |
|--------------------|--|
| ... | ... |
| Sumber Data | <p>Jenis Sumber Data, pilihan isian :</p> <p>A. Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otomatis : jelaskan nama aplikasi (yang sudah digunakan di KPK), modul atau menu dari aplikasi tersebut, dan data yang digunakan sebagai indikator. 2. Semi Otomatis : lampirkan file spreadsheet yang diunggah dan jelaskan sel data yang digunakan sebagai indikator. <p>B. Non-Elektronik (Manual)</p> <p>Sebutkan nama dokumen dan data yang digunakan sebagai indikator dalam dokumen tersebut.</p> <p>Waktu Pengambilan Data Elektronik, pilihan isian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sewaktu-waktu (<i>real-time</i>) ▪ Waktu tertentu : (sebutkan waktunya) |
| ... | ... |

-o0o-